



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 64/HM.00/X/2023**

**Pertemuan Komnas HAM dengan Mendagri terkait  
Penyampaian Hasil Pemantauan Komnas HAM Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat  
Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pengungsi Internal di wilayah Kabupaten  
Maybrat - Provinsi Papua Barat Daya**

Hari Rabu, 11 Oktober 2023, Komnas HAM telah melaksanakan Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pertemuan tersebut dilaksanakan atas permintaan Komnas HAM setelah Komnas HAM melaksanakan pemantauan di sejumlah wilayah di Papua.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiuro dan Para Komisioner yaitu Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Prabianto Mukti Wibowo, Putu Elvina, Hari Kurniawan dan Saurlin Siagian. Pada kesempatan tersebut Komnas HAM mempresentasikan laporan hasil temuan atas kegiatan pemantauan yang diselenggarakan Komnas HAM di 2 (dua) wilayah di Papua, yaitu: Hasil Pemantauan Permasalahan Penolakan Masyarakat Adat Welesi dan Wouma terhadap Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, serta Hasil Pemantauan terhadap Permasalahan Pengungsi Internal di wilayah Kabupaten Maybrat - Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya

Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Mendagri untuk memberi atensi kepada permasalahan rencana pembangunan kantor Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan, agar masyarakat mendapatkan solusi dan pelaksanaan DOB dapat berjalan dengan lancar, sementara risiko konflik sosial dapat dicegah.

Sementara untuk situasi pengungsi Komnas HAM meminta agar Kemendagri memfasilitasi koordinasi antara pemerintah provinsi Papua Barat Daya dengan pemerintah kabupaten Maybrat, Sorong, Sorong Selatan dan Aimas, di mana ditemukan adanya pengungsi sejak tahun 2021 yang Sebagian belum kembali ke tempat tinggal mereka. Komnas HAM berharap agar para pengungsi dapat segera kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat kembali beraktivitas sosial.

Mendagri merespons rekomendasi Komnas HAM secara positif melalui komitmen untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan Komnas HAM, dalam merespons persoalan rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Terkait penanganan pengungsi, Mendagri juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Komnas HAM mengapresiasi keterbukaan Mendagri dan komitmen beliau dalam memastikan bahwa pelaksanaan DOB akan meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan di wilayah seluruh provinsi di Papua.

**Jakarta, 12 Oktober 2023**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Atnike Nova Sigiuro**

Ketua

Narahubung:

Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo  
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah